

Submitted: 1 September 2025	Accepted: 29 November 2025	Published: 16 Januari 2026
-----------------------------	----------------------------	----------------------------

Dampak Konflik Pemilihan Umum Terhadap Perpecahan Jemaat: Studi Kasus Jemaat Gereja Masehi Injili di Halmahera Eben-Haezer Tuguis

Silvia Shorea Mauwilik

Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) Maluku Utara

mauwiliksilvia@gmail.com

Abstract

Conflict in church life is not only caused by doctrinal or structural differences, but can also be triggered by social-political dynamics around the congregation. This article aims to examine the impact of political conflicts on church life, using a case study method in the GMIH Eben-Haezer Tuguis Congregation, North Maluku. The conflict began due to tensions following the legislative elections in 2024. When one congregation member who ran for a seat in the local parliament faced defeat, some of his supporters could not accept the outcome, that then sparked internal division within the Eben-Haezer Tuguis Congregation. This research uses a descriptive qualitative approach and a case study method. The results indicate that the impact of this conflict led to family divisions, fractured fellowship within the congregation, children feeling unworthy to be involved in worship services, and strained peer relationships. Therefore, the church is called to be present actively.

Keywords: *the impact of congregation conflict, pastoral reconciliation*

Abstrak

Konflik dalam kehidupan bergereja tidak hanya disebabkan oleh perbedaan doktrinal atau struktural, tetapi juga dapat dipicu oleh dinamika sosial dan politik di sekitar jemaat. Artikel ini hendak mengkaji dampak dari konflik politik terhadap kehidupan bergereja dengan metode studi kasus di Jemaat GMIH Eben-Haezer Tuguis, Maluku Utara. Konflik terjadi akibat ketegangan pascapemilihan legislatif di tahun 2024 lalu. Ketika ada salah satu anggota jemaat yang mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagian pendukungnya tidak menerima hasil kekalahan yang kemudian hal tersebut memicu perpecahan internal dalam Jemaat Eben-Haezer Tuguis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan metode studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak dari konflik tersebut membuat keluarga dan persekutuan jemaat terpecah, serta anak merasa dirinya tidak layak untuk terlibat dalam pelayanan ibadah, juga mengalami kerengangan relasi dengan teman sebaya. Oleh sebab itu, gereja dipanggil untuk hadir secara aktif

sebagai agen perdamaian melalui pelayanan pastoral yang mencakup pendampingan, pemulihan relasi, dan pendidikan kesadaran politik bagi umat.

Kata Kunci: *dampak konflik jemaat, rekonsiliasi pastoral*

PENDAHULUAN

Konflik merupakan bagian dari relaitas kehidupan manusia yang tidak dapat dihindarkan, termasuk dalam kehidupan bergereja. Dalam konteks masyarakat lokal, konflik dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti: ekonomi, budaya, dan politik.¹ Salah satu bentuk konflik yang sering kali luput dari perhatian gereja adalah konflik yang berakar dari proses politik, khususnya pemilihan umum. Pemilihan Umum (Pemilu) Kepala Daerah adalah salah satu instrumen penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Demokrasi pada dasarnya memiliki dimensi lokal, sehingga pemilihan Kepala Daerah secara langsung bertujuan untuk memperkuat legitimasi demokrasi di tingkat masyarakat. Melalui pemilihan umum rakyat diberi kesempatan untuk menentukan pemimpin daerahnya sendiri sesuai dengan harapan untuk dapat mewujudkan daerah yang lebih aman dan sejahtera.² Namun, sering kali setelah proses pemilihan selesai, terdapat pihak-pihak yang tidak menerima hasil yang ditetapkan. Hal ini sering kali dapat memicu ketegangan, perselisihan, bahkan konflik terbuka di tengah masyarakat. Konflik tersebut biasanya berakar pada kekecewaan terhadap hasil Pemilu, tuduhan kecurangan, perbedaan dukungan politik, hingga kepentingan kelompok tertentu yang merasa dirugikan.³ Akibatnya adalah tujuan utama dari Pemilu untuk memperkuat legitimasi demokrasi justru terancam karena proses demokrasi yang seharusnya menjadi wadah partisipasi rakyat berubah menjadi pemicu perpecahan. Selain itu, konflik pascaPemilu bukan hanya berdampak pada perpecahan internal gereja tetapi juga hubungan sosial, bahkan keluarga. Ketika warga gereja terlibat dalam kontestasi politik, sering kali persinggungan antara identitas iman dan kepentingan politik terjadi.⁴ Hal ini terlihat jelas di Jemaat GMIH Eben-Haezer, Desa Tuguis, Kabupaten Halmahera Barat, pascapemilihan legislatif tahun 2024.

Situasi internal jemaat mengalami gejolak serius ketika salah satu anggota jemaat yang mencalonkan diri sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang mana sebagian pendukungnya tidak menerima kekalahan. Kondisi tersebut memicu keretakan hubungan sosial, keluarga, dan spiritual dalam jemaat. Perselisihan semakin tajam karena keluarga besar calon legislatif tersebut kerap berbenturan dengan pihak lain, bahkan menuntut agar Majelis Jemaat (MJ) yang menjadi saksi partai dari calon lain diberhentikan dari jabatannya. Mereka menyatakan bahwa apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi, mereka tidak akan beribadah dalam satu gedung gereja di Jemaat GMIH Eben-Haezer Tuguis. Namun, berdasarkan aturan gereja, tidak ada larangan bagi seorang anggota MJ untuk menjadi saksi partai. Oleh karena itu, tuntutan tersebut tidak dapat dipenuhi.

¹ Hugh F. Halverstadt, *Mengelola Konflik Gereja* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007).

² Yosin Kogoya, "Konflik Politik Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Puncak Papua Tahun 2011-2012)," *UMY* 2, no. 1 (2015).

³ Solehudin et al., *Manajemen Konflik Dan Organisasi* (Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri, 2024).

⁴ Efiza and Definitif E. Mendrofa, *Manajemen Konflik* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2024).

Situasi semakin memanas ketika sebagian keluarga calon legislatif juga menyalahkan Pendeta karena tidak memilih dan mendukung anggota jemaatnya. Akibat ketidakpuasan ini adalah kelompok tersebut memutuskan untuk beribadah di gedung gereja baru milik bersama yang masih dalam tahap pembangunan dan menamakan jemaat tersebut sebagai “Jemaat Yerusalem.” Melihat permasalahan tersebut, upaya rekonsiliasi dilakukan oleh Pimpinan Jemaat melalui proses pengurusan dan aksi damai sebanyak tiga kali.⁵ Namun, karena pihak yang berselisih tetap berpegang pada tuntutan pemberhentian MJ, proses mediasi dilanjutkan ke tingkat wilayah dan sinode.

Akan tetapi, hasilnya tetap sama. Mereka menolak untuk kembali ke Jemaat GMIH Eben-Haezer Tuguis dan memilih untuk memisahkan diri. Akhirnya, Sinode GMIH menyetujui pembentukan Jemaat Yerusalem dengan beberapa pertimbangan. Pertama, secara kuantitatif mereka telah memenuhi syarat minimal 78 Kepala Keluarga (KK) sesuai Peraturan Jemaat BAB II tentang Pembentukan Jemaat.⁶ Jemaat Yerusalem memiliki 259 Jiwa dengan 78 KK sehingga layak ditetapkan sebagai jemaat definitif. Kedua, dalam Desa Tuguis juga terdapat Gereja Persekutuan Roh Kudus (GPR). Sinode GMIH khawatir, jika hal itu tidak disetujui oleh kelompok yang memisahkan diri, maka mereka akan pindah ke aliran GPR. Selain itu, meskipun Sinode GMIH memberikan izin, pihak Sinode GMIH menetapkan bahwa Jemaat Yerusalem harus membangun gereja sendiri dan tidak menggunakan gedung gereja baru milik bersama yang belum ditahbiskan. Perpecahan ini menjadi gambaran nyata bahwa jemaat begitu membutuhkan dinamika politik yang sehat dan pendampingan pastoral yang memadai.

Penelitian Yogi Gumilar S. Akbar dkk. menunjukkan bahwa konflik pascaPemilu sering kali terjadi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor.⁷ Namun, kajian tentang pastoralia dalam mengatasi masalah ini jarang dilakukan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dampak konflik Pemilu terhadap kehidupan bergereja dan menawarkan pendekatan pastoral sebagai jalan rekonsiliasi. Dengan studi kasus Jemaat GMIH Eben-Haezer Tuguis, tulisan ini menyoroti pentingnya mengupayakan gereja sebagai ruang pemulihan yang mampu merangkul kembali warga jemaat yang terpecah akibat konflik politik. Gereja tidak cukup hanya bersifat netral secara pasif, tetapi perlu tampil sebagai pelayan damai yang aktif, mengedepankan penyembuhan luka sosial, serta membangun kesadaran politik yang bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus (MSK). MSK digunakan untuk memahami secara mendalam konteks pengalaman dan dinamika sosial-teologis yang terjadi dalam jemaat, khususnya menyangkut peran pastoral gereja dalam mengembangkan partisipasi pemuda dan pemudi.⁸ Jenis data yang digunakan adalah data primer, yang didapatkan melalui wawancara dengan informan utama, serta data sekunder yang diperoleh dari buku literatur teologi pastoral, dokumen gerejawi, dan hasil penelitian sejenis yang relevan. Dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu: observasi partisipatif, wawancara, dan studi dokumen. Dari data yang diperoleh, penulis menganalisis dengan menggunakan analisis tematik dengan langkah-langkah, yakni: mengorganisir data, identifikasi tema, refleksi teologis, dan perumusan rekomendasi pastoral.

⁵ M. P., “Interview,” 2025.

⁶ GMIH, *Tata Gereja Dan Peraturan GMIH: Peraturan Kelembagaan* (Tobelo: GMIH, n.d.), 136.

⁷ Yogi Gumilar, “Analisis Dinamika Konflik Pemilihan Umum Di Kota Bandung,” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2024): 4489–4506.

⁸ SEAGST Institute of Advanced Pastoral Studies and Panitia Studi Kasus NTT, *Studi Kasus Pastoral II – Nusa Tenggara Timur*, 1990.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi, Dinamika, dan Dampak Konflik terhadap Kehidupan Bergereja di Jemaat GMIH Eben-Haezer Tuguis

Konflik merupakan bagian dari realitas kehidupan manusia yang tidak dapat dihindarkan. Ia muncul sebagai konsekuensi dari adanya perbedaan kepentingan, kebutuhan, nilai, dan pandangan antara individu yang satu dengan individu yang lain, kelompok, bahkan antarorganisasi. Dalam kehidupan sosial, konflik banyak dipandang sebagai sesuatu yang negatif karena menimbulkan pertentangan, perselisihan, dan perpecahan.⁹ Konflik dalam Jemaat GMIH Eben-Haezer Tuguis bermula dari pelaksanaan Pemilu legislatif tahun 2024. Salah satu anggota jemaat mencalonkan diri sebagai anggota DPRD. Dalam proses pencalonan, ada muncul dukungan terbuka dari sebagian anggota jemaat yang sebagian besar hampir dari keluarga besar calon DPRD, baik secara pribadi maupun kelompok. Hal ini menciptakan polarisasi yang sebelumnya tidak kentara dalam persekutuan gereja.

Ketegangan memuncak setelah hasil Pemilu diumumkan bahwa calon dari jemaat tidak berhasil memperoleh kursi. Kekecewaan yang tidak terluruskan secara sehat berubah menjadi tudingan, kecurigaan, dan sikap saling menjauh dengan sesama anggota jemaat. Beberapa kelompok mulai membentuk persekutuan sendiri dan tidak lagi hadir dalam ibadah bersama. Ketegangan ini berkembang menjadi konflik terbuka yang mengakibatkan perpecahan internal dan lahirnya kelompok pelayanan tandingan di desa yang sama. Selain itu, proses rekonsiliasi telah dilakukan dan diupayakan sebanyak tiga kali yakni pada tingkat jemaat, wilayah dan sinode. Namun, seluruh proses tersebut tidak berhasil membawa perubahan yang signifikan. Upaya rekonsiliasi yang dilakukan cenderung bersifat formalitas dan lebih menekankan pada penyelesaian administratif dari pada proses pastoral yang menyentuh hati sehingga tidak sampai menyentuh akar dari persoalan yang sesungguhnya. Mekanisme rekonsiliasi yang dijalankan masih berupa pertemuan serimonial tanpa pendalaman masalah dan ruang dialog yang terbuka, serta tidak melibatkan semua pihak. Akibatnya kekecewaan, luka batin, dan keterpisahan tempat ibadah berlanjut di tengah jemaat yang tidak pulih pascakonflik. Dalam waktu yang singkat gereja yang tadinya menjadi pusat persekutuan berubah menjadi medan pertentangan kepentingan. Ibadah Minggu terganggu dan kegiatan kategorial melemah.

Pada dasarnya konflik yang terjadi menimbulkan berbagai dampak yang serius terhadap kehidupan jemaat. Berdasarkan hasil observasi, perpecahan dalam jemaat terjadi, serta ibadah tidak lagi menjadi ruang pertemuan spiritual bersama, melainkan terbelah menurut kelompok politik yang saling berselisih. Keterlibatan dalam pelayanan liturgis menurun, di mana banyak anak muda yang merasa tidak pantas ikut terlibat dalam pelayanan karena keterpisahan tempat ibadah. Berdasarkan hasil wawancara, ada dua informan yang mengalami kurangnya kenyamanan dalam keluarga yang menyebabkan individu menjauhkan diri karena tidak percaya diri. AN mengungkapkan bahwa ketika ada masalah dalam keluarga, ia tidak berani mengambil bagian dalam pelayanan.¹⁰

⁹ Efiza and Mendrofa, *Manajemen Konflik*.

¹⁰ N.A., "Interview" (Tuguis, 2024).

Berdasarkan hasil observasi, Papa dan Kakak-kakak AN beribadah di Jemaat Yerusalem, sedangkan AN dan Mamanya beribadah di Jemaat GMIH Eben-Haezer Tuguis. Hal ini yang bagi penulis yang membuat AN merasa terbebani ketika terlibat dalam pelayanan karena menurutnya pelayanan adalah hal yang sakral dan suci, sehingga ketika Firman diberitakan seharusnya umat hidup tentram dan damai serta tidak mengalami masalah. Dampak konflik yang terjadi dalam kehidupan berjemaat berpengaruh pada keluarga AN yang bercerai berai dan berpisah-pisah tempat beribadah. Ketidaknyamanan dalam keluarga AN membuat dirinya merasa tidak pantas dan layak untuk memberitakan Firman dan terlibat dalam pelayanan.

Konflik yang terjadi tidak hanya mempengaruhi dinamika pelayanan gereja, tetapi juga memberikan dampak nyata dalam hubungan sosial jemaat. Persahabatan dan rasa kekeluargaan yang sebelumnya erat mulai melemah dan tergantikan oleh jarak sosial yang terbentuk akibat perbedaan kelompok. Hal ini tampak jelas dalam berbagai kegiatan sosial, seperti: perayaan tahun baru, acara duka, dan pesta, di mana warga jemaat cenderung berkumpul dan berinteraksi hanya dengan kelompoknya masing-masing. Pemisahan ini menimbulkan suasana canggung dan mengikis interaksi lintas kelompok yang sebelumnya berjalan hangat.

Salah seorang pemuda mengungkapkan pengalamannya, bahwa sebelum konflik terjadi ia mempunyai banyak teman pemuda dari Jemaat GMIH Eben-Haezer Tuguis. Namun, setelah keluarganya pindah beribadah di Jemaat Yerusalem, teman-teman dekatnya mulai menjauh. Ia menyatakan, “Saya merasa sedih dan bingung karena teman-teman saya menjauhkan diri dari saya.”¹¹ Pengalaman serupa juga diungkapkan oleh pemuda lain, seperti: DD dan ID, yang merasakan bahwa hubungan mereka dengan teman-teman yang berbeda tempat ibadah menjadi renggang, bahkan terputus.¹² Situasi ini menimbulkan sekat emosional yang memisahkan anak muda, yang sebelumnya memiliki kedekatan tanpa memandang perbedaan.

Bahkan, dampak konflik ini merembes ke dalam ruang lingkup keluarga. Salah satu keluarga yang diwawancarai, MA., mengungkapkan bahwa hubungan rumah tangga mertuanya ikut terganggu, yang mana suami dan istri tidur terpisah, bahkan kegiatan memasak dilakukan secara terpisah.¹³ Fenomena ini menunjukkan bahwa perpecahan jemaat tidak hanya bersifat institusional atau struktural, tetapi juga mempengaruhi kehidupan relasional yang paling mendasar, baik di ranah sosial maupun keluarga. Selain itu, berdasarkan hasil observasi lapangan, saat perayaan tahun baru terlihat kedua kelompok jemaat yang terpecah ini yang saling bersaing dalam menciptakan keramaian. Persaingan tersebut tampak dari cara mereka dalam memeriahkan acara dan mengundang partisipasi warga, yang secara tidak langsung mempertegas jarak sosial di antara mereka. Kondisi ini mengindikasikan bahwa konflik yang terjadi memiliki implikasi sosial yang luas, yang tidak hanya membentuk polarisasi dalam persekutuan, tetapi juga mempengaruhi kualitas interaksi dan kohesi sosial di tingkat komunitas.

Peran Pastoral dalam Menghadapi Konflik

Pastoral berasal dari bahasa Latin yaitu *pastore* dan dalam bahasa Yunani disebut *poimen* yang berarti *gembala*.¹⁴ Pastoralia merupakan suatu upaya untuk memanusiaikan sesama manusia. Upaya memanusiaikan manusia itu mengandung makna rekonsiliasi yang menjadi tujuan utama suatu proses pendampingan dan konseling yang dilakukan. Menurut Susanto, pastoralia adalah suatu pelayanan gereja yang sangat penting, khususnya pada masa kini, di mana manusia banyak menghadapi berbagai masalah dan persoalan dalam kehidupan mereka.

¹¹ D.A., “Interview” (Tuguis, 2024).

¹² D.D. and I.D., “Interview” (Tuguis, 2024).

¹³ A.M., “Interview” (Tuguis, 2024).

¹⁴ D.J. Engel, *Pastoral Dan Kebutuhan Dasar Konseling* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016).

Menurut Daniel Susanto, terdapat sekurang-kurangnya tiga pengertian yang berbeda tentang teologi pastoral di kalangan Kristen Protestan, yaitu:

- Secara tradisional teologi pastoral dipandang sebagai cabang teologi yang merumuskan prinsip-prinsip, teori-teori, dan prosedur praktis bagi pelayanan Pendeta dalam semua fungsinya. Dalam pelayanan ini, Pendeta menjadi fokusnya.
- Teologi pastoral merupakan bidang studi teologi praktis tentang teori dan praktik pelayanan dan konseling pastoral. Hal ini berfokus pada pembimbingan, penyembuhan, serta perkembangan moral kehidupan, termasuk masalah-masalah khusus, seperti: penyakit, duka, ataupun rasa bersalah.
- Teologi pastoral adalah salah satu bentuk refleksi teologis di mana pengalaman pastoral berfungsi sebagai suatu konteks bagi perkembangan kritis dan pengertian teologis yang mendasar.¹⁵

Dalam hal ini teologi pastoral tidak dipandang sebagai sebuah teologi pengembangan tetapi suatu tipe teologi kontekstual, yakni: suatu upaya berteologi yang dilakukan secara pastoral.¹⁶ Menurut pandangan klasik dari William A. Clebesh dan Charles R. Jaekle (dalam Susanto), peran pastoral mencakup empat fungsi utama: *healing* (penyembuhan), *sustaining* (penopangan), *guiding* (pembimbingan), dan *reconciling* (pendamaian). Howard Clinbell menambahkan satu fungsi lagi yaitu *nurturing* (memelihara).¹⁷ Seluruh fungsi ini diarahkan untuk memulihkan keutuhan spiritual dan relasional jemaat, khususnya mereka yang mengalami luka atau ketegangan akibat konflik. *Pastoral care consists of helping acts done by representative Christian persons, directed toward the healing, sustaining, guiding, and reconciling of troubled persons whose troubles arise in the context of ultimate meanings and concern.*¹⁸

Kemudian, Emmanuel Yartekwey Lartey memperluas pemahaman tersebut dengan mengusulkan pendekatan yang lebih kontekstual dan dialogis. Ia menggabungkan dimensi interkultural, psikologis, dan spiritual, serta menambahkan dua fungsi penting: *liberating* (membebaskan) dan *empowering* (memberdayakan). Menurutnya, “*pastoral care must be fundamentally committed to human dignity, justice, and the promotion of life-enhancing relationship.*”¹⁹ Dalam situasi konflik, pendekatan ini menegaskan bahwa peran pastoral tidak hanya memulihkan relasi yang rusak, tetapi juga mengupayakan keadilan, menghapus praktik pelayanan yang bersifat eksklusif, dan membangun hubungan yang memulihkan kehidupan bersama.

Dalam konteks penelitian ini, fungsi-fungsi pastoral tersebut menjadi instrumen penting dalam menghadapi konflik jemaat. Fungsi menyembuhkan (*healing*) dibutuhkan untuk memulihkan luka batin pemuda dan jemaat yang tersakiti akibat perpecahan. Fungsi menopang (*sustaining*) menjaga keteguhan iman dan semangat pelayanan di tengah ketidakpastian pascakonflik. Fungsi membimbing (*guiding*) memberikan arah yang jelas agar jemaat dapat berjalan bersama menuju pemulihan dan kesatuan. Fungsi mendamaikan (*reconciling*) menjadi inti proses memulihkan hubungan antara pemuda dan keluarga, serta kelompok jemaat yang terbelah.

¹⁵ Daniel Susanto, *Teologi Pastoral (Bahan Perkuliahan Pastoral Holistik Transformatif)*, 2024.

¹⁶ Daniel Susanto, *Bunga Rampai Teologi Dan Pelayanan Pastoral* (Menteng Jakarta: Majelis Jakarta GKI Menteng, 2003).

¹⁷ Daniel Susanto, *Pelayanan Pastoral Holistik Transformatif*, n.d., 5-7.

¹⁸ Susanto, *Pelayanan Pastoral Holistik Transformatif*.

¹⁹ Emmanuel Yartekwei Lartey, *In Living Color: An Intercultural Approach to Pastoral Care and Counseling* (London: Jessica Kingsley Publishers, 2003), 68.

Fungsi membebaskan (*liberating*) menjadi penting ketika konflik melahirkan budaya pelayanan yang eksklusif, yang menyingkirkan pihak tertentu karena pandangan politik yang berbeda. Gereja melalui peran pastoral harus membebaskan jemaat dari stereotip dan sekat-sekat tersebut, sehingga semua pihak dapat kembali merasa memiliki ruang dan saling berdamai satu dengan lain. Dalam situasi demikian, gereja perlu tampil bukan hanya sebagai penonton tetapi sebagai subjek utama dalam proses pemulihan. Pendekatan pastoral dapat digunakan untuk menjembatani jurang konflik dan membawa jemaat kembali pada semangat perdamaian dan kesatuan sebagai tubuh Kristus.

Fungsi-fungsi pastoral yang dijabarkan oleh Clebesh dan Jaekle, yakni: menyembuhkan (*healing*), menopang (*sustaining*), membimbing (*guiding*), dan mendamaikan (*reconciling*). Dalam pendekatan yang lebih kontemporer Howard Clinbell menambahkan fungsi memelihara (*nurturing*), dan Emanuel Y. Lartey menambahkan fungsi memberdayakan (*empowering*) dan membebaskan (*liberating*) untuk menjawab dinamika konteks yang lebih kompleks, seperti yang dialami jemaat akibat dampak dari konflik.²⁰ Fungsi *healing* sangat relevan dalam merespons trauma psikologis dan spiritual yang dialami oleh pemuda. Pendeta dan MJ perlu memfasilitasi ruang-ruang mencurahkan hati yang bersifat pastoral, ibadah pemulihan, dan kunjungan dari rumah ke rumah untuk mendengarkan setiap luka yang dialami warga jemaat. Gereja dipanggil untuk menghadirkan suasana yang mengobati dan meneguhkan kembali martabat pribadi mereka. Pelayanan ini tidak hanya dalam bentuk doa, tetapi juga dalam dialog yang penuh empati. Penyembuhan batin harus menjadi langkah awal sebelum membangun kembali kepercayaan bersama.

Fungsi *sustaining* diperlukan untuk mendampingi pemuda yang sedang berada dalam kondisi lelah, bingung, dan kehilangan arah spiritual. Pemuda yang menghadapi tekanan keluarga, konflik internal gereja, atau keterasingan dalam komunitas sangat membutuhkan peneguhan secara terus-menerus. Dalam hal ini, kehadiran pendeta, guru jemaat, dan rekan sebaya sangat penting sebagai bentuk kehadiran pastoral yang nyata. Fungsi *guiding* dibutuhkan terkait perlunya bimbingan spiritual yang sistematis melalui khotbah, Pendalaman Alkitab, dan diskusi di antara warga jemaat mengenai bagaimana seorang Kristen menghadapi konflik bukan dengan pembenaran tapi dengan pertobatan yang kolektif. Fungsi *reconciling* diperlukan untuk menjembatani relasi yang rusak baik antarpemuda maupun antarkeluarga dalam jemaat. Perpecahan yang terjadi di Jemaat GMIH Eben-Haezer Tuguis bukan hanya menyangkut institusi, tetapi telah melukai ikatan relasi. Pemuda yang tumbuh dalam keluarga yang berbeda gereja sering kali mengalami kebingungan identitas dan kesetiaan rohani. Gereja harus menghadirkan pelayanan rekonsiliasi yang mengembalikan rasa kebersamaan dalam tubuh Kristus. Fungsi *empowering* merupakan kunci dari pelayanan pastoral transformatif. Pendidikan politik bagi warga jemaat sangat penting, gereja dapat mengadakan seminar atau diskusi publik mengenai bagaimana orang Kristen terlibat dalam politik tanpa mencederai tubuh Kristus. Kesadaran bahwa panggilan politik adalah panggilan etis dan bukan alat kekuasaan.

Perencanaan Pastoral

Strategi ini bertujuan menjadi solusi dari dampak akibat konflik, mempererat kembali relasi anatarjemaat dan menumbuhkan partisipasi semua kelompok pelayanan gereja.

1. Pelayanan Pastoral (Peneymbuhan dan Pendampingan)

Dalam menghadapi dampak konflik, gereja dapat menghadirkan pelayanan pastoral yang berfokus pada penyembuhan dan pendampingan baik pribadi maupun keluarga. Salah satu bentuk nyata adalah konseling pastoral bagi keluarga yang terpecah karena konflik, baik dalam relasi suami dan istri, kerabat, maupun saudara kandung. Melalui konseling, umat dapat didorong untuk saling mendengarkan, mengungkapkan luka yang ada, serta menemukan jalur pemulihan dan penyelesaian bersama.

²⁰ Susanto, *Pelayanan Pastoral Holistik Transformatif*.

Selain itu, pihak gereja juga dapat menyelenggarakan retreat penyembuhan rohani yang menekankan bagaimana pentingnya rekonsiliasi dan pengampunan. Wadah tersebut menjadi ruang yang aman bagi jemaat untuk merenungkan kembali relasi mereka dengan Allah juga sesama. Hal ini terutama bagi kaum muda yang merasa dirinya tidak layak untuk terlibat dalam wadah pelayanan.

2. Membangun Kolaborasi

Clineball memberi penegasan bahwa pastoralia itu adalah sebuah pelayanan yang mencakup penyembuhan dan hal yang menumbuhkan bagi seseorang. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Janse Van Rensburg: *“This means that pastoral care and the other aspects of ministry, including Christian charity, evangelism, and actions of empowerment should be seen as aspects of the same action, being, as the expression goes, two sides of the same coin.”* Dari pendapat tokoh tersebut, penulis memberi penegasan bahwa ini diperlukan orang lain untuk dapat membantu pendeta dalam melakukan pelayanan pastoral secara utuh.²¹

Dalam konteks konflik jemaat, hal ini berarti bahwa gereja perlu juga membuka ruang dialog dan kerja sama lintas pihak agar proses pemulihan yang menyeluruh tercipta. Misalnya, dalam melaksanakan proses dialog antardua pihak gereja, yakni: Jemaat GMIH Eben-Haezer dan Jemaat Yerusalem yang berada dalam satu desa. Gereja dapat menjalin kolaborasi bersama pemerintah desa untuk mempererat kembali relasi jemaat yang telah terpecah. Kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan sosial bersama dalam desa yang melibatkan kedua pihak. Hal ini penting, karena pada dasarnya gereja tidak dapat berjalan sendiri, tapi membangun jaringan atau kerja sama dengan pihak-pihak yang dapat membantu anggota jemaat untuk berada dalam fase penyembuhan.

KESIMPULAN

Konflik yang terjadi di Jemaat GMIH Eben Haezer Tuguis adalah dampak pemilihan legislatif tahun 2024 yang memperlihatkan bagaimana dinamika politik dapat merusak relasi persekutuan gereja, bahkan memicu perpecahan jemaat. Konflik tersebut tidak hanya menimbulkan polarisasi dalam kehidupan berjemaat, tetapi juga berdampak serius dalam kehidupan keluarga, pergaulan anak muda, dan relasi sosial masyarakat desa. Upaya rekonsiliasi yang dilakukan secara administratif nyatanya terbukti belum cukup efektif untuk menyentuh akar persoalan tersebut, sehingga jemaat tetap terpecah. Dalam konteks demikian, gereja dipanggil untuk hadir secara aktif melalui pelayanan pastoral yang menyentuh dimensi penyembuhan, pendampingan, pembimbingan, pemeliharaan, pendamaian, dan pemberdayaan serta pembebasan. Gereja tidak hanya berfungsi sebagai penegak konflik, tetapi juga sebagai agen transformasi yang membangun kesadaran politik warga jemaat agar keterlibatan mereka dalam ranah publik tetap berakar pada nilai iman dan kesatuan tubuh Kristus.

REKOMENDASI

Berdasarkan masalah yang ada, maka penulis merekomendasi beberapa hal untuk mengatasi hal demikian.

1. Pendidikan Politik Gereja

Gereja perlu menyelenggarakan pendidikan politik berbasis iman Kristen, agar warga jemaat memiliki pemahaman etis dan bertanggung jawab dalam keterlibatan politik. Kesadaran bahwa politik adalah alat pelayanan dan bukan alat kekuasaan harus ditanamkan sejak dini, terutama di kalangan kaum muda. Dalam hal ini pendidikan yang diupayakan bukan hanya sehari tapi minimal per bulan, sehingga jemaat dapat memahami hal sedemikian lebih banyak.

²¹ Fibry Jati Nugroho, “Pendampingan Pastoral Holistik: Sebuah Usulan Konseptual Pembinaan Warga Gereja,” *Evangelikal: Jurnal Teologi Injil dan Pembinaan Warga Jemaat* 1, no. 2 (2017).

Politik dalam pandangan teologis Kristen bukan sesuatu yang kotor atau terpisah dari kehidupan iman, tetapi bagian dari panggilan manusia sebagai ciptaan Allah yang hidup dalam relasi sosial. Pada hakikatnya politik adalah upaya untuk mengatur kehidupan bersama menuju *bonum commune* (kebaikan bersama). Dalam perspektif ini keterlibatan orang Kristen dalam politik perlu dimaknai sebagai tanggung jawab iman untuk menghadirkan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan bagi sesama. Sebagaimana tertulis dalam Yeremia 29:7 bahwa umat Allah dipanggil untuk mengusahakan kesejahteraan kota tempat mereka berada, maka kesejahteraan kota tersebut adalah kesejahteraan umat juga. Ini menegaskan bahwa partisipasi dalam urusan publik, termasuk politik merupakan bentuk nyata dari kasih Allah.

Yesus Kristus sendiri juga menunjukkan dimensi politis dari Injil melalui sikap dan tindakannya yang membela kaum yang tertindas, menegur ketidakadilan, dan menolak kekuasaan yang menindas manusia. Pelayanan Yesus mengandung pesan moral dan sosial yang kuat bahwa Kerajaan Allah tidak hanya berbicara tentang keselamatan rohani, tetapi juga transformasi kehidupan sosial. Seperti yang ditegaskan oleh Johannes B. Metz, iman Kristen memiliki dimensi politik karena selalu berkaitan dengan pembebasan manusia dari situasi penindasan.²² Hal yang sama juga ditegaskan oleh Gustavo Gutierrez, yang mana ia menekankan bahwa teologi harus berpihak pada mereka yang menderita akibat struktur sosial yang tidak adil.²³ Dengan demikian, politik dilihat bukan sebagai alat perebutan kekuasaan, tetapi sebagai sarana menghadirkan kasih dan keadilan Allah di tengah dunia.

Dalam konteks Jemaat GMIH Eben-Haezer Tuguis, perpecahan yang terjadi pascapemilihan legislatif tahun 2024 menunjukkan kurangnya kesadaran teologis mengenai politik. Politik dipahami secara sempit sebagai arena persaingan dan kemenangan pribadi, bukan sebagai panggilan untuk melayani. Oleh karena itu, gereja perlu mengambil peran aktif dalam memberikan pendidikan politik gereja yang berlandaskan nilai-nilai Injil. Pendidikan politik ini bertujuan untuk membentuk kesadaran etis warga jemaat agar melihat kekuasaan dan peran publik sebagai sarana pelayanan, serta bukan dominasi. Dengan demikian, pendidikan politik gereja menjadi bagian dari pelayanan pastoral yang transformatif, serta menuntun jemaat untuk memahami politik sebagai ruang kesaksian iman dan wujud kehadiran Allah yang membawa damai sejahtera di tengah masyarakat.

2. Pihak Gereja

Gereja perlu mengeksplorasi bahan ajar untuk khotbah, katekisasi dan pengajaran Alkitab yang menekankan pada kesatuan, kasih, dan rekonsiliasi, sebagai inti dari kehidupan iman. Selain itu, hal yang perlu juga dilakukan yakni konseling bagi mereka yang terjun dalam Pemilu, terutama keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- A.M. "Interview," 2024.
D.A. "Interview," 2024.
D.D., and I.D. "Interview," 2024.
Daniel Susanto. *Bunga Rampai Teologi Dan Pelayanan Pastoral*. Menteng Jakarta: Majelis Jakarta GKI Menteng, 2003.
Efiza, and Definitif E. Mendrofa. *Manajemen Konflik*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2024.
Engel, D.J. *Pastoral Dan Kebutuhan Dasar Konseling*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016.
et al., Solehudin. *Manajemen Konflik Dan Organisasi*. Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri, 2024.
GMIH. *Tata Gereja Dan Peraturan GMIH: Peraturan Kelembagaan*. Tobelo: GMIH, n.d.

²² Johannes Baptist Metz, *Faith In History and Society: Toward a Practical Fundamental Theology* (New York: Crossroad, 1980).

²³ Gutierrez Gustavo, *A Theology of Liberation: History, Politics, and Salvation* (Maryknoll, N.Y.: Orbis Books, 1973).

- Gumilar, Yogi. "Analisis Dinamika Konflik Pemilihan Umum Di Kota Bandung." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2024): 4489–4506.
- Gustavo, Gutierrez. *A Theology of Liberation: History, Politics, and Salvation*. Maryknoll, N.Y.: Orbis Books, 1973.
- Halverstadt, Hugh F. *Mengelola Konflik Gereja*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007.
- Kogoya, Yosin. "Konflik Politik Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Puncak Papua Tahun 2011-2012)." *UMY* 2, no. 1 (2015).
- Lartey, Emmanuel Yartekwei. *In Living Color: An Intercultural Approach to Pastoral Care and Counseling*. London: Jessica Kingsley Publishers, 2003.
- M. P. "Interview," 2025.
- Metz, Johannes Baptist. *Faith In History and Society: Toward a Practical Fundamental Theology*. New York: Crossroad, 1980.
- N.A. "Interview," 2024.
- Nugroho, Fibry Jati. "Pendampingan Pastoral Holistik: Sebuah Usulan Konseptual Pembinaan Warga Gereja." *Evangelikal: Jurnal Teologi Injil dan Pembinaan Warga Jemaat* 1, no. 2 (2017).
- SEAGST Institute of Advanced Pastoral Studies, and Panitia Studi Kasus NTT. *Studi Kasus Pastoral II – Nusa Tenggara Timur*, 1990.
- Susanto, Daniel. *Pelayanan Pastoral Holistik Transformatif*, n.d.
- . *Teologi Pastoral (Bahan Perkuliahan Pastoral Holistik Transformatif)*, 2024.